



PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Adi bin Abd. Kadir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Minarti binti Arif, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 170/Pdt.P/2018/PA.Pwl, tanggal 5 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Maret 2008 di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif, yang dinikahkan oleh

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Imam Masjid Nurul Hikmah bernama Rusli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama M. Idris dan Muslimin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama:
 1. Sukma Ayu binti Adi
 2. Rahmania binti Adi
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Adi bin Abd. Kadir) dengan Pemohon II (Minarti binti Arif) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2008 di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Muslimin bin Kaging, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Adi bin Abd. Kadir dan Pemohon II bernama Minarti binti Arif ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung ;
 - bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
 - bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2008, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Puppung Uring, Desa Puppung Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Nurul Hikmah bernama Rusli karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa bergama Islam yaitu M. Idris dan Muslimin ;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah (berpoligami) ;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya ;
2. M. Idris bin Baddu Rasid, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II Puppup Uring, Desa Puppup Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Adi bin Abd. Kadir dan Pemohon II bernama Minarti binti Arif ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung ;
 - bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
 - bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 2 Maret 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Puppup Uring, Desa Puppup Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Nurul Hikma bernama Rusli karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arif, sedangkan yang dijadikan mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa bergama Islam yaitu M. Idris dan Muslimin ;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus adalah janda cerai mati ;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah (berpoligami) ;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 2 Maret 2008, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan pendidikan anak serta keperluan lainnya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti ah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 2008, di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Arif (ayah kandung Pemohon II) ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rusli (Imam Mesjid Nurul Hikmah) dan saksinya adalah M.Idris dan Muslimin serta maharnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena kelalaian Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpoligami ;
7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anaknya membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, karena kelalaian Imam yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Pemohon II dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Rusli sebagai wakil dari Karim selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Adi bin Abd. Kadir) dengan Pemohon II (Minarti binti Arif) yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2008, di Dusun Puppu Uring, Desa Puppu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adi bin Abd. Kadir) dengan Pemohon II (Minarti binti Arif), yang berlangsung pada tanggal 2 Maret 2008, di Dusun Puppu Uring, Desa Pupu Uring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 Miladiah bertepatan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sarkowi, S.H.I dan Samsidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PA.Pwl